

KEJAHATAN AKUNTANSI & KESIAPAN KITA

Oleh: Darwis Darwis (Staf Pengajar FEUI)

Pengadilan atas Bernard Ebbers (63), mantan Pimpinan Eksekutif (CEO) WorldCom mencapai akhirnya. Ebbers yang sukses membangun imperium bisnis WorldCom dari perusahaan kecil hingga menjadi salah satu raksasa telekomunikasi di AS dihukum 20 tahun karena penipuan akuntansi bernilai 11 miliar dollar AS, terbesar dalam sejarah kejahatan akuntansi di AS.

Kasus ini menambah deretan panjang perusahaan besar dan ternama AS yang masuk kamar bedah Securities and Exchange Commission (SEC)/otoritas pasar modal AS dan berakhir di meja hijau dalam sepuluh tahun terakhir. Sebelumnya, Enron, Global Crossing, Kmart, Williams Co., dan Xerox juga berurusan dengan penyelidikan atas penipuan akuntansi dalam laporan keuangan mereka. Enron dan Kmart malah dinyatakan pailit dengan amat tragis. Sebagai catatan, Enron yang waktu itu memiliki kapitalisasi saham hampir USD 80 miliar hancur berkeping-keping. Pekerjaannya kehilangan dana pensiun, investor kehilangan uang, dan pasar modal tiba-tiba terkena demam "Enronitis" untuk menjelaskan turunnya indeks secara tajam akibat kasus tersebut.

Menyusul berbagai skandal akuntansi yang melibatkan nilai yang sangat besar tersebut, politisi AS dengan serius memastikan peristiwa serupa tidak terulang lagi. Presiden Bush dalam sebuah kesempatan mengumumkan sejumlah proposal untuk melakukan "crack down" atas perilaku tidak etis para petinggi perusahaan tersebut. SEC dan *Justice Department* mendapatkan anggaran lebih banyak untuk melawan *fraud* keuangan, hukuman dan penalti untuk pelaku diperberat.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Adakah kekhawatiran masyarakat soal potensi penipuan akuntansi yang dilakukan berbagai perusahaan (publik, BUMN, maupun swasta)? Jangan lupa, beberapa analisis dengan gamblang menyebutkan terjadinya krisis perbankan nasional tahun 1997, tidak lepas dari ketidak-

mampuan laporan keuangan yang mereka berikan menjadi potret utuh (*clearly portrays*) tentang *resources* ekonomi sesungguhnya dari bank-bank tersebut. Sehingga perusahaan yang terlihat dari luar sehat-sehat saja, ternyata keropos di dalam. Terlepas apakah itu disengaja atau tidak, kejadian itu semestinya memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa skandal akuntansi teramat mahal harganya, di manapun itu terjadi.

Bentuk-bentuk skandal akuntansi

Semakin berkembang rekayasa keuangan yang dilakukan, skandal penipuan akuntansi mengambil rupa yang semakin beragam dan canggih. Akan tetapi bentuk penipuan tersebut kurang lebih bisa dijelaskan berdasarkan empat prinsip dasar akuntansi yang lazim digunakan dalam mencatat transaksi yang terjadi. Ide dasar kecurangan tersebut adalah pengingkaran prinsip-prinsip tersebut.

Yang pertama adalah prinsip biaya historis (*historical cost*). Standar akuntansi keuangan Indonesia (PSAK) yang mengacu pada *generally accepted accounting principles* (GAAP) negara-negara lain sebenarnya mengizinkan pencatatan biaya berdasarkan metode lain, *fair value* misalnya, sepanjang dalam kriteria yang jelas,

baku dan konsisten. Masalahnya para pelaku penipuan akuntansi seringkali menggunakan celah yang terdapat dalam prinsip ini, misalnya dalam mencatat barang persediaan.

Kurzweil Applied Intelligence Inc., AS, 1996, dengan sengaja tidak melakukan pencatatan atas persediaan mereka yang bernilai jutaan dollar AS.



1-24-05

Perusahaan seolah-olah mengirimkan barang tersebut ke pelanggannya, padahal *inventory* tersebut hanya ditumpuk dari satu gudang ke gudang lain.

Pengingkaran prinsip ini juga bisa terjadi saat perusahaan menyusutkan properti, pabrik, dan perlengkapan produksi. Sebagai gambaran, dua metode yang sebenarnya sama-sama diperbolehkan oleh GAAP menghasilkan jumlah penyusutan yang amat berbeda. Lihatlah saat Du Pont mengubah metode depresiasi mereka dari akselari ke garis lurus (*stright-line*), pendapatan bersih laporan keuangannya untuk tahun itu melonjak tajam hingga USD 250 juta.

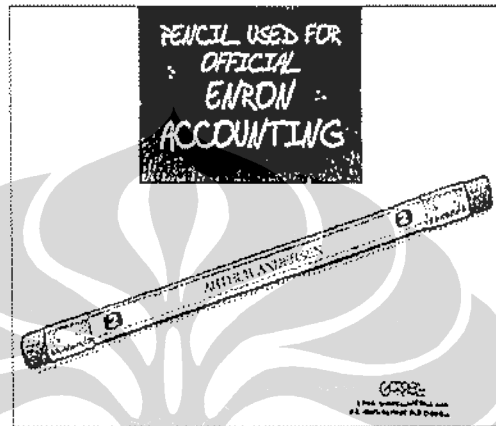
Prinsip yang kedua adalah pengakuan pendapatan. Ada banyak bentuk kecurangan yang dapat dilakukan saat mengakui pendapatan. Priceline.com (2000) misalnya, melaporkan pendapatan sebesar USD 152 juta. Tetapi ternyata angka yang dilaporkan oleh perusahaan yang bergerak dalam *online airline tickets* dan kamar hotel ini merupakan angka "gross booking". Setelah dikurangi berbagai setoran kepada *airline*, dan hotel, *real revenue* dari perusahaan tersebut tinggal USD 18 juta. Karena investor tidak tahu-menahu, saham Priceline.com terlanjur diperdagangkan dengan nilai 214 kali dari pendapatan sesungguhnya.

Prinsip ketiga adalah tentang kesesuaian (*matching principles*). Perusahaan boleh saja menggeser periode pendapatan dan pembiayaan ke periode berikutnya (*deferred*) atau sebaliknya mengakuinya lebih awal (*accrued*), sepanjang metode yang dipakai oleh perusahaan tersebut sesuai dengan GAAP. Masalahnya prinsip ini amat rentan disalahgunakan.

Inilah yang terjadi pada WorldCom. Dari jumlah penipuan akuntansi sebesar USD 11 miliar, sedikitnya USD 3,1 miliar berasal dari biaya sambungan/*line costs* 2001 (termasuk didalamnya *telecom access* dan *transport charges*) yang di-*deferred* oleh WorldCom menjadi biaya modal dan diamortisasikan selama sepuluh tahun. Padahal jelas-jelas GAAP mengatur biaya tersebut harus dibiayakan periode itu juga.

Prinsip keempat adalah *full disclosure*. *Rule of thumb* untuk mengingkari prinsip ini sederhana saja. Laporkan bagian-bagian yang membuat laporan keuangan tersebut terlihat lebih baik, dan singkirkan jauh-jauh bagian sebaliknya yang tidak menarik bagi investor, kreditor, kantor pajak, bahkan pemegang saham sekalipun.

Untuk prinsip ini, meskipun tidak selalu benar, pernyataan CEO General Electric Jeffrey Immelt bisa menjadi pelajaran berharga bagi petinggi perusahaan di Indonesia: "I want people to think about GE as we think of GE—as a transparent company. If necessary, GE's annual report will be the size of New York City's phone book!"



Kesiapan Kita

Belajar dari kasus penipuan akuntansi di AS dan semakin beragamnya bentuk skandal tersebut, sepantasnya pihak-pihak berkepentingan di Indonesia mengambil langkah serius. Jika di Indonesia kasus serupa belum banyak muncul itu lebih karena level pengawasan dan kemampuan kita untuk membuka kasus-kasus tersebut masih amat lemah. Kita masih banyak bicara soal sistem dan aturan main, sedangkan pelaksanaan sistem yang disertai dengan hukuman memadai bagi para pelaku masih kedodoran. Padahal diakui atau tidak berbagai skandal penipuan akuntansi ibarat gunung es. Puncaknya tidak terlihat, tapi di dalamnya besar menakutkan.

Dalam menangani potensi penipuan akuntansi ini setidaknya ada tiga pihak yang relevan untuk disiapkan. Yang pertama adalah otoritas pengawas pasar modal (BAPEPAM), pihak peradilan (mulai dari jaksa, hakim, dan

penyidik), serta IAI—dewan penyusun standar akuntansi. Jika melihat peta kesiapan pihak-pihak tersebut, yang paling serius dan mendesak untuk disiapkan adalah BAPEPAM. Terlepas dari berbagai *constraints* yang mereka miliki, otoritas pasar kita masih kalah garang dibandingkan SEC. Ingat kasus Monsanto. Ketika SEC menghukum para pelakunya, BAPEPAM yang notebene berkuasa atas wilayah yurisdiksi kasus penyusunan tersebut *adem ayem* saja.

Sudah saatnya kewenangan dan kekuasaan BAPEPAM ditajamkan. Bahkan sudah saatnya BAPEPAM memiliki divisi tersendiri untuk melawan *fraud* keuangan, tentu ditambah dengan *budget* dan sumber daya yang memadai. Di samping itu, mengingat kejahatan akuntansi juga bisa dilakukan oleh BUMN (bukan perusahaan *go public*), ruang lingkup BAPEPAM juga harus mencapainya. Bukankah sering terdengar selentingan tentang politisi yang memeras isi perut BUMN—dengan menggunakan jurus-jurus akuntansi. Itu artinya lembaga serupa yang selama ini mengawasi area lain lebih baik diintegrasikan saja ke dalam BAPEPAM.

Di saat bersamaan, pihak peradilan juga harus menyiapkan diri. Kita tidak ingin para penyidik, jaksa dan hakim kalah pintar dibandingkan dengan pelaku kejahatan akuntansi tersebut. Isu skandal ini spesifik, dan hanya orang-orang yang mengerti tentang akuntansi yang bisa membuka berbagai penipuan tersebut. Kabar baiknya, IAI sejauh ini memiliki pakar yang memadai dan dinilai cukup tanggap terhadap kebutuhan GAAP yang *update*. Mereka bisa menjadi sumber pakar untuk memerangi kasus skandal akuntansi tersebut. Sayangnya tidak bisa dipungkiri mereka juga bagian dari berbagai kantor akuntan publik yang ada, yang selama ini memegang kunci pemberian pendapat wajar atau tidak atas laporan keuangan perusahaan.

Terakhir, seorang akuntan sejatinya identik dengan seorang dokter. Salah satu kunci yang juga penting adalah kode etik profesi. Jika dokter malpraktek bisa menyebabkan melayangnya nyawa

seorang pasien, maka malpraktek akuntan bisa menyebabkan melayangnya nyawa sebuah perusahaan. Oleh karena itu, siapapun yang saat ini menjalani profesi akuntan, dan atau sedang mempersiapkan diri menjadi akuntan, perlu menanamkan kebanggaan atas profesi ini. Tidak ada salahnya mengingat kembali kritik pedas mantan petinggi BI dulu tentang auditor Indonesia, soal siapa saja yang sebenarnya “bermasalah” itu urusan lain.***



Tahukah anda kebangkrutan terbesar yang pernah terjadi yang diakibatkan tidak adanya transparansi dalam perusahaan?

Kebangkrutan terbesar dialami oleh WorldCom sebesar 107 Milyar Dollar atau sekitar 963 trilyun rupiah.